



PEMERINTAH KOTA  
**PONTIANAK**



**2023**

# **RENCANA KERJA TAHUN 2023**

**DINAS KESEHATAN  
KOTA PONTIANAK**



## **KATA PENGANTAR**

*Assalamualaikum. Wr.Wb*

Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya, penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 ini dapat diselesaikan. Dokumen ini memuat rencana kerja Program, Kegiatan, dan Sub.Kegiatan beserta indikator kinerja dan pendanaannya periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Nomenklatur baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang ikut serta dalam memberikan pemikiran, ide dan tenaga guna menyelesaikan dokumen ini. Kami berupaya menyajikan informasi dengan selengkap-lengkapnyanya walaupun disadari masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penyajian data dan narasi dalam dokumen ini.

Semoga Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2023 ini dapat memberikan gambaran riil rencana pembangunan kesehatan di Kota Pontianak Tahun 2023, serta menjadi masukan bagi semua pihak terkait agar dapat direalisasikan sesuai rencana. Akhir kata semoga dapat menjadi sumbangsih dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Pontianak.

*Walaikum salam. Wr.Wb*

Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Pontianak  
  
**dr. Saptiko, M.Med.PH**  
Pembina Tk. I  
NIP! 19661113 199603 1 003



## **DAFTAR ISI**

	Hal
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK	
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN	
KATA PENGANTAR KEPALA DINAS KESEHATAN .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu .....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan .....	24
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan.....	43
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	47
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	62
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN</b>	
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional.....	67
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan .....	68
3.3 Program dan Kegiatan .....	70
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....</b>	<b>82</b>
4.1 Rencana Kerja .....	82
4.2 Pendanaan .....	98
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>92</b>



## DAFTAR TABEL

	Hal
2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021.....	17
2.2 Realisasi Capaian SPM Tahun 2021 .....	24
2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2021 .....	34
2.4 Formulasi Isu-isu Penting Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2021.....	46
2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 .....	48
2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 .....	62
3.1 Tujuan, Sasaran beserta Indikator Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2021 – 2024 .....	69
3.2 Jenis Pelayanan dan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 .....	71
3.3 Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2021-2024 .....	74
4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 .....	83



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan yang berorientasi pada masa depan dengan melalui serangkaian pilihan-pilihan (Faludi, 1973). Menurut Peter Hall (1992), Perencanaan dimaknai sebagai penyusunan rangkaian tindakan secara berurutan yang mengarah pada pencapaian tujuan. Dalam konteks Perencanaan perangkat daerah, Rencana Kerja Dinas Kesehatan diartikan sebagai proses perencanaan Dinas Kesehatan untuk periode satu tahun, yang mencakup kebijakan, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan dalam kegiatan pembangunan bidang kesehatan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak merupakan dokumen resmi Dinas Kesehatan yang memuat program, dan kegiatan pada pelayanan Dinas Kesehatan khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Dokumen Rencana Kerja dimaksudkan sebagai pedoman dalam penentuan dan pelaksanaan kinerja berdasarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan sampai pada sub kegiatan perangkat daerah guna mencapai dan mewujudkan arah kebijakan umum pembangunan daerah sesuai visi dan misi kepala daerah. Adapun Rencana Kerja Dinas Kesehatan terkait langsung dengan pelayanan publik pada masyarakat yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan dimulai dengan persiapan dan pengumpulan data, informasi, menganalisa data dan gambaran pelayanan pada Dinas Kesehatan untuk mengerucutkannya pada penentuan isu-isu penting bidang kesehatan



yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi, hingga menghasilkan perumusan tujuan dan sasaran yang juga didasarkan pada review hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan Rencana Strategis lima tahunan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja juga merupakan rumusan yang didasarkan pada usulan kegiatan prioritas masyarakat yang diperoleh melalui proses musyawarah rencana pembangunan masyarakat (Musrenbang) dari tingkat kelurahan hingga kota.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra dan mengacu pada Dokumen RKPD Tahun 2023
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana Kerja didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif
- c. Penyusunan Rencana Kerja bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD
- d. Rumusan program / kegiatan di dalam Rencana Kerja didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib / pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, dan total kebutuhan dana tahun 2023.

Keterkaitan Rencana Kerja Dinas Kesehatan dengan dokumen perencanaan lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena dokumen ini merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) yang memiliki hubungan keselarasan dengan Dokumen Perencanaan Daerah lainnya baik RPJMD, maupun



RKPD. Rencana Kerja Dinas Kesehatan merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, Renstra, dan RPJMD, bagi RKA PD, KUA, PPAS, dan RAPB.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);





11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak



- Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).
  18. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 66);
  19. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
  20. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2020-2024;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 adalah memberikan arah sekaligus sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi Dinas Kesehatan, dalam penyelenggaraan program kerja Dinas Kesehatan dan terselenggaranya pembangunan yang efektif dan efisien sehingga



dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang (tahun 2023) melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis secara berkesinambungan.

### **1.3.2 Tujuan**

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

- a. Mendiskripsikan tentang program-program yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak;
- b. Menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan pada tahun berjalan untuk mendukung pencapaian target tujuan, sasaran program dan indikator kinerja kegiatan;
- c. Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) melalui pengukuran kinerja Dinas Kesehatan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Pembangunan Kesehatan Daerah;
- d. Menjadi dasar bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan;
- e. Memberikan acuan bagi Dinas Kesehatan dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- f. Meningkatkan sistem surveilans dan sistem informasi kesehatan dalam rangka mendukung perencanaan berbasis data dan informasi yang akurat; serta
- g. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :



## **BAB I. Pendahuluan**

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

## **BAB II. Evaluasi Rencana Kerja Sampai Tahun lalu**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2021

## **BAB III. Tujuan Dan Sasaran Dinas Kesehatan**

Bab tiga ini memaparkan telaah / kajian kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran perangkat daerah/ Dinas Kesehatan

## **BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan**

Berisi ulasan Tabel Program dan Kegiatan sampai Sub Kegiatan berdasarkan pada Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan didasarkan pada rancangan akhir kebijakan umum anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Pada Bab ini pula dijelaskan narasi terkait pendanaan dan alokasi pagu anggaran indikatif untuk tahun 2023.

## **BAB V. Penutup**

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan Renja sesuai dengan kebutuhan dan rencana tindak lanjut.



## BAB II

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Tahun 2021 Dinas Kesehatan Kota Pontianak telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2020. Sesuai dengan Misi pertama Pemerintah Kota Pontianak adalah Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya, dengan tujuan dari Dinas Kesehatan adalah Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator kinerja tujuannya adalah:

1. Angka Harapan Hidup
2. Angka Stunting Balita

Adapun sasaran Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024, sebagai berikut :

**“Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat”**,

Berikut realisasi 10 Indikator Sasaran Dinas Kesehatan, yaitu :

#### 1) **Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup**

Pada Tahun 2021 Indikator Kinerja Utama Angka Kematian Ibu realisasinya sebesar 159,91% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 2020 yakni 72,12 per 100.000 KH. Dari data diatas Peningkatan angka indikator tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, yang mana peningkatan Angka Kematian Ibu di Kota Pontianak dari 18 Kasus Kematian, dengan 12 kasus kematian merupakan kasus yang disebabkan oleh virus Covid-19.

Adapun sub kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Utama penurunan Angka Kematian Ibu, adalah:

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu hamil
- b. Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin



- c. Sub Kegiatan Pengelolaan Bayi Baru Lahir
- d. Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Balita
- e. Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kota melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan Kebidanan.

**2) Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup**

Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Angka Kematian Bayi di Tahun 2021 sebesar 1.87 per 1000 KH, angka realisasi ini lebih kecil dibandingkan dengan target maksimal angka kematian bayi yang ditetapkan tahun 2021 sebesar 2,30 per 1000 KH. Hal ini menunjukkan Kota Pontianak berhasil menekan kasus Kematian Bayi di Tahun 2021.

Adapun sub kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Utama penurunan Angka Kematian Bayi, adalah:

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu hamil
- b. Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c. Sub Kegiatan Pengelolaan Bayi Baru Lahir
- d. Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Balita
- e. Sub. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kota melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan Kebidanan.

**3) Persentase Orang Terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar**

Upaya peningkatan pelayanan pada penderita TBC sesuai standar pelayanan minimal ditetapkan sebesar 100%. Untuk Tahun 2021 capaian pelayanan untuk penderita TBC mencapai 62.07%, dimana angka ini belum mencapai target yang maksimal, dikarenakan terjadi pandemi virus Covid-19 yang terjadi di Kota Pontianak.

Adapun Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung target capaian ini adalah :



- a. Sub kegiatan pelayanan penyakit menular dan tidak menular;
- b. Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan.

#### **4) Insiden Rate HIV**

Upaya menurunkan angka kesakitan penderita HIV di Kota Pontianak telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Adapun target indikator yang digunakan dalam upaya penurunan penderita HIV adalah Insiden Rate. Insiden rate adalah jumlah rata – rata kasus baru suatu penyakit. Target indikatornya di tahun 2021 adalah 0,0190%. Tahun 2021 capaian Realisasi capaian indikator dalam upaya menurunkan insiden baru kasus HIV adalah 0,013%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam penanganan penurunan kasus HIV telah berhasil.

Adapun Sub Kegiatan yang menunjang upaya penurunan Insiden rate HIV adalah :

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV. Sub Kegiatan tersebut, selain dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan pada bidang terkait juga dibantu oleh unit Komisi Penanggulangan AIDS/HIV (KPA);
- b. Sub Kegiatan Penyakit Menular dan Tidak Menular.

#### **5) Insiden Rate DBD**

Tahun 2021 Angka Kesakitan Penderita DBD di Kota Pontianak memiliki realisasi sebesar 2,38 per 100.000 Penduduk, dimana capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan Target tahun 2021 sebesar <49 per 100.000 Penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan sangat berhasil menekan Kasus DBD di Kota Pontianak.

Adapun Sub kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Utama upaya penurunan Kesakitan Penderita DBD adalah :



- a. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (PSN).
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan.

#### **6) Prevalensi Penderita Hipertensi di Kota Pontianak**

Upaya penanganan penderita Hipertensi di Kota Pontianak ditetapkan dengan target sebesar 28%. Adapun realisasi capaian kinerja penderita Hipertensi pada tahun 2021 belum dapat ditetapkan karena hasil capaiannya berdasarkan Hasil Risekesda yang dilaksanakan setiap lima tahun. Untuk data penderita Hipertensi yang tersedia berdasarkan dari laporan faslitas Kesehatan yang ada di Kota Pontianak sebesar 34.744 orang dari jumlah sasaran penderita sebesar 167.463 penduduk. Adapun sub kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target penurunan prevalensi penderita hipertensi adalah :

- a. Sub Kegiatan Pelayanan penyakit menular dan tidak menular;
- b. Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
- c. Sub Kegiatan Surveilans Kesehatan;
- d. Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif.

#### **7) Prevalensi Penderita Diabetes Mellitus di Kota Pontianak**

Upaya Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam pengendalian Prevalensi Penderita Diabetes Mellitus ditargetkan sebesar 2,50%. Untuk capaian kinerja kegiatan pada tahun 2021 belum dapat ditetapkan karena hasil capaiannya berdasarkan Hasil Riskesda yang dilaksanakan setiap lima tahun. Adapun data penderita Diabetes Mellitus yang tersedia berdasarkan dari laporan Fasilitas Kesehatan yang ada di Kota Pontianak sebesar 5.218 orang dari jumlah sasaran penderita sebesar 13.791 penduduk. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai target penurunan prevalensi Diabetes Mellitus adalah melalui sub kegiatan:





- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus;
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
- c. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- d. Sub Kegiatan Surveilans Kesehatan

**8) Angka Wasting Balita**

Angka Wasting Balita adalah perbandingan berat badan balita dengan tinggi badan (BB/TB). Angka capaian Wasting Balita sebesar 5,19% dari target 7,80% berdasarkan Data dari Survey PSG (Penilaian Status Gizi). Capaian tersebut menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan telah berhasil melakukan penekanan jumlah Balita Wasting di Kota Pontianak. Berikut Sub Kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai target penurunan Angka Wasting Balita di Kota Pontianak adalah :

- a. Sub Kegiatan Upaya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat;
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita;
- c. Sub Kegiatan Pengelolaan Bayi Baru Lahir;
- d. Sub Kegiatan Pengelolaan Ibu Hamil.

**9) Angka Underweight Balita**

Angka Underweight Balita adalah perbandingan berat badan Balita dengan Umur balita (BB/U). Angka capaian kinerja Underweight Balita sebesar 126,08% dengan realisasi kinerja sebesar 9,61% dari target sebesar 13% berdasarkan Data dari Survey PSG (Penilaian Status Gizi). Adapun Sub kegiatan untuk menunjang upaya penurunan Angka Underweight Balita adalah :

- a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

**10) Angka Stunting Balita**

Angka Stunting Balita adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang cukup lama, sehingga



mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak balita, yaitu tinggi badan anak lebih rendah dari standar usianya.

Realisasi Indikator kinerja utama Angka Stunting Balita di Tahun 2021 sebesar 12,38%. Angka capaian kinerja Stunting Balita didapatkan berdasarkan Data dari Survey PSG (Penilaian Status Gizi), angka tersebut lebih rendah dari target maksimal yang ditetapkan di Kota Pontianak yaitu sebesar 18,00%. Artinya upaya penurunan kasus Balita Stunting di Kota Pontianak dikatakan telah Berhasil. Adapun Sub Kegiatan yang menunjang upaya penurunan Angka stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Balita adalah :

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Gizi masyarakat.
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya beberapa Program Dinas Kesehatan Kota Pontianak, diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Memiliki 4 kegiatan dan 22 sub.kegiatan yang dilaksanakan, dan terdapat 7 sub. kegiatan yang realisasi anggarannya tidak mencapai 90%. Hal ini dikarenakan adanya refocusing anggaran di tahun berjalan, sehingga sub kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat  
Memiliki 4 kegiatan dan 35 sub kegiatan yang ada, terdapat 13 sub.kegiatan yang realisasinya di bawah 90%. Hal ini dikarenakan ada beberapa sub.kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan di masa pandemi Covid-19.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan  
Memiliki 2 kegiatan dan 2 sub.kegiatan, namun terdapat 1 sub.kegiatan yang masih belum mencapai target sebesar 90%, yang disebabkan karena kondisi pandemi Covid-19, sehingga sub.kegiatan



tersebut tidak bisa dilaksanakan mengingat jenis sub. kegiatannya adalah pelatihan yang memerlukan tatap muka langsung.

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman; Memiliki 5 kegiatan dan 5 sub.kegiatan, terdapat 2 sub.kegiatan yang masih belum memenuhi target sebesar 90%. Hal ini disebabkan karena sub.kegiatan tersebut merupakan kegiatan lapangan yang mengharuskan untuk bertemu langsung dengan masyarakat, dimana masa pandemi Covid-19 tidak bisa dilaksanakan sesuai yang ditargetkan.
5. Program Perberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.  
Terdapat 1 kegiatan dari 1 sub.kegiatan yang ada, dan sudah mencapai target yang ditentukan sebesar 90%. Karena sebagian besar sub.kegiatannya adalah penyediaan media edukasi dan promosi.

Adapun implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pontianak, adalah :

- a. Perlu dilakukan komitmen yang kuat dari seluruh Fasilitas Kesehatan, Perangkat Daerah terkait, serta masyarakat Kota Pontianak untuk dapat mendukung pencapaian Target kinerja Dinas Kesehatan;
- b. Melakukan monitoring, evaluasi, serta pendampingan pada beberapa kegiatan yang masih belum mencapai target yang ditetapkan;
- c. Menganalisa serta menetapkan prioritas pemecahan masalah kesehatan yang belum mencapai target;
- d. Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan serta Sarana Prasarana pendukung untuk memaksimalkan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penghambat capaian kinerja Dinas Kesehatan, yaitu :

- a. Melakukan analisis kebutuhan anggaran kegiatan prioritas yang mendukung kinerja utama Dinas Kesehatan Kota Pontianak.



- b. Melakukan evaluasi rutin per triwulan terkait dengan capaian kinerja setiap kegiatan agar dapat diambil tindak lanjut untuk percepatan capaian kinerja.



**Tabel 2.1**  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah  
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021  
Kota Pontianak

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Dinkes Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	Urusan Pemerintahan Wajib									
102	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan									
10201	<b>5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	80%	NA	80%	80%	100,00	80,00%	160%	200,00%
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	NA	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00	10 Dokumen	29 dokumen	100,00
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	NA	12 Bulan	12 bulan	100,00	12 Bulan	12 bulan	100,00



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

				3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12 Bulan	NA	12 Bulan	12 bulan	100,00	12 Bulan	12 bulan	100,00
				4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	NA	12 Bulan	12 bulan	100,00	12 Bulan	12 bulan	100,00
				5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Unit	NA	10 unit	10 unit	100,00	6 Unit	6 unit	100,00
				6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	NA	12 Bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
				7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	48 unit	NA	88 unit	54 unit	88,00	48 unit	99 unit	100,00
10202				<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan Pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir	100%	NA	87%	100%	114,94	90%	190%	190,00%
					Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan kesehatan balita	100%	NA	92%	100%	108,70	95%	195%	195,000%
					Persentase Puskesmas yg melaksanakan usia anak sekolah dan remaja	100%	NA	92%	100%	108,70	95%	195%	195,000%
					Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan pelayanan kesehatan lansia	100%	NA	85%	100%	117,65	90%	190%	190,000%
					Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	100%	NA	100%	100%	100,00	100%	200%	200,000%



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

					Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan reproduksi	100%	NA	100%	100%	100,00	100%	200%	200,000%
10202	2.01	01	1.1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		Persentase fasilitas kesehatan pemerintah sesuai standar	100%	NA	100%	100%	100,00	100%	200%	200,00%
					Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah UPTD/ UPK yang memiliki obat, BMHP, dan Alkes sesuai standar	100%	NA	100%	100%	100,00	100%	200%	200,00%
10202	2.02	01	1.2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1) Akreditasi Fasilitas Kesehatan	100% (utama/paripurna = 6 puskesmas)	NA	100% (utama/paripurna = 6 puskesmas)	100% (utama/paripurna = 6 puskesmas)	#VALUE!	100% (utama/paripurna = 6 puskesmas)	0%	100,00%
					2) Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	NA	100%	93,81%	93,81	100%	100%	100,00%
					3) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	NA	100%	92,57%	92,57	100%	100%	100,00%
					4) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	NA	100%	92,25%	92,25	100%	100%	100,00%
					5) Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100%	NA	100%	83,15%	83,15	100%	100%	100,00%
					6) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	NA	100%	36,33%	36,33	100%	100%	100,00%



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

					7)Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	NA	100%	29,71%	29,71	100%	130%	129,71%
					8)Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	NA	100%	56,91%	56,91	100%	100%	100,00%
					9)Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	NA	100%	20,72%	20,72	100%	121%	120,72%
					10)Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	NA	100%	37,84%	37,84	100%	138%	137,84%
					11)Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	NA	100%	58,06%	58,06	100%	158%	158,06%
					12)Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	NA	100%	62,07%	62,07	100%	162%	162,07%
					13)Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	NA	100%	99,47%	99,47	100%	199%	199,47%
					14)Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	95%	NA	93,6%	58,00%	61,97	94,1%	58%	61,05%
					15)Persentase jemaah calon haji yang terdeteksi faktor resiko kesehatan	100%	NA	100%	100%	100,00	100%	200%	200,00%





**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

					16)Persentase penanggulangan KLB yang direspon < 24 jam	100%	NA	100%	100%	100,00	100%	200%	200,00%
					17)Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	2 per 1000 Penduduk	NA	2 per 1000 Penduduk	1 per 1000 penduduk	100	2 per 1000 Penduduk	100%	100%
					18)Persentase RS rujukan tingkat Kab/Kota yang terakreditasi	100%	NA	100%	92%	92,00	100%	192%	192,00%
					19)Persentase masyarakat miskin dan tidak mampu serta kelompok tertentu memperoleh jaminan kesehatan	100%	NA	100%	91%	91,00	100%	191%	191,00%
					20)Persentase pemeriksaan croscek slide TBC	100%	NA	100%	100%	100,00	100%	200%	200,00%
10202	2.03	01	1.3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase FKTP dan FKRTL yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan	80%	NA	80%	100%	125			100%	125,0%
10202	2.04	02	1.4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rumah Sakit Kota Pontianak yang terakreditasi	100%	NA	100%	91,67%	91,67			92%	91,7%
10203			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	Ratio Dokter, Perawat, dan Bidan	2 per 1000 Penduduk	NA	2,3 per 1.000 Penduduk	4,35	189,13	2,3 per 1.000 Penduduk (0,0023)		0,44%	100,00%
					Persentase Faskes yang memenuhi SDM berkualitas sesuai standar	90%	NA	90%	100%	111,11	90%	190%	211%



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

10203	2.02	1. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase praktek tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100%	NA	100%	NA	NA	100%	100%	100%
10203	2.03	2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan UKOM bagi tenkes	100%	NA	100%	NA	NA	100%	100%	100%
10204		<b>Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</b>	Persentase Fasilitas Kesehatan Farmasi, makan, minuman sesuai standar	90%	NA	90%	100%	111,11	90%	190%	211,11%
10204	2.01	1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin operasional	90%	NA	85%	100,00%	117,65	85%	185%	205,56%
10204	2.02	2. Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Jumlah Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 yang memiliki ijin operasional	100%	NA	100%	100%	100,00	100%	200%	200,00%



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

10204	2.03	3. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Jumlah Industri Rumah Tangga yang baru dan telah habis masa ijinnya untuk memiliki ijin operasional	100%	NA	100%	100%	100,00	100%	200%	200,00%
			Persentase pelaku usaha yang memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan	100%	NA	100%	100%	100,00	100%	200%	200,00%
10204	2.04	4. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM yang terdaftar memiliki sertifikat laik sehat	90%	NA	85%	100,00%	117,65	85%	185%	205,56%
10204	2.06	5. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri Rumah Tangga	100%	NA	100%	100%	100,00	100%	200%	200,00%
10205		<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>	Persentase tatanan kota sehat yang telah dilaksanakan	90%	NA	90%	29,00%	32,22	90%	0%	0%
10205	2.01	1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor dibidang kesehatan	100%	NA	100%	49,00%	49,00	100%	149%	149,00%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2021



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Pontianak merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengampu 12 Indikator Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (SPM). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

Adapun Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak Semester II Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2021

No	INDIKATOR	Target Dalam Tahun	Sasaran Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL				
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	12.576	11.798	93,81
2	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN				
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	12.005	11.113	92,57
3	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR				
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	11.433	10547	92,25
4	PELAYANAN KESEHATAN BALITA				
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	39.797	33.090	83.15
5	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR				
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	88.835	32.270	36,33



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

6	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF				
	Persentase orang usia 15-59 tahun menepatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	446.808	132.767	29,71
7	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT				
	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	63.988	36.415	56,91
8	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI				
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	167.643	34.744	20,72
9	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS				
	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	13.791	5.218	37,84
10	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT				
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	1.383	803	58,06
11	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS				
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	8.100	5.028	62,07
12	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS=HIV)				
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	15.459	15.542	99,47

Sumber : Data Capaian Akhir SPM Dinas Kesehatan, 2021

Berdasarkan dari Tabel diatas maka dapat dijelaskan, yaitu :

**1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**

Realisasi capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2021 sebesar 93,81% dari target 100%, dari capaian tersebut dapat di simpulkan bahwa Dinas Kesehatan telah melakukan beberapa



---

upaya terkait Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dilakukan dengan memenuhi kriteria 10 T, diantaranya :

- a) Penimbangan berat badan;
- b) Pengukuran tekanan darah yang dilakukan secara teratur;
- c) Pengukuran lingkaran lengan atas (LILA);
- d) Pengukuran tinggi puncak Rahim (fundus uteri) yang dilakukan secara teratur;
- e) Penentuan presentasi janin dan denyut jantung jani (DJJ);
- f) Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid (Td);
- g) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan;
- h) Tes Laboratorium mencakup: Tes kehamilan, Pemeriksaan Hb, Pemeriksaan Golongan Darah dan Gluko-Protein urin dilakukan atas indikasi yang diperlukan;
- i) Tatalaksana/penanganan kasus dilakukan sesuai dengan kewenangan pada kunjungan ke 1, 2, 3 dan 4 (rujukan penanganan kasus komplikasi dalam kehamilan);
- j) Temu wicara (konseling) dilakukan mengacu pada buku pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu pada kunjungan ke 1, 2, 3 dan 4.

## **2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**

Realisasi capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Tahun 2021 sebesar 92,57% dari target 100%, dari capaian tersebut dapat di simpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Pontianak telah memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kota Pontianak dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan persalinan sesuai standar merupakan pertolongan persalinan baik normal maupun komplikasi di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta, yang berupa :



- 
- a. Persalinan normal mengikuti acuan asuhan persalinan normal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku mengatur tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
  - b. Persalinan dengan komplikasi mengikuti acuan dari Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan.

### **3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**

Adapun realisasi capaian kinerja Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Tahun 2021 sebesar 92,25% dari target 100%. Dinas Kesehatan Kota Pontianak memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu pada Pelayanan Neonatal Esensial yang terdiri dari:

- a. Perawatan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam) dan;
- b. Perawatan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari).  
Dilakukan minimal 3 kali sesuai dengan periode Kunjungan Neonatal (KN) yaitu: KN1 (6 - 48 jam), KN2 (3 - 7 hari) dan KN3 (8 - 28 hari).

### **4. Pelayanan Kesehatan Balita**

Realisasi capaian kinerja untuk Pelayanan Kesehatan Balita tahun 2021 yaitu sebesar 83,15% dari target 100%. Dinas Kesehatan Kota Pontianak wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah Kota Pontianak dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan. Jenis Pelayanan Kesehatan Balita, meliputi :



- a. Pelayanan kesehatan balita usia 0 -11 bulan
- b. Pelayanan Kesehatan balita 12-23 bulan
- c. Pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan

**5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**

Pada Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar, realisasi capaian kinerja tahun 2021 sebesar 36,33% dari target 100%. Dinas Kesehatan Kota Pontianak wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar setingkat kelas 1 sampai dengan kelas 9 di wilayah Kota Pontianak dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar adalah skrining kesehatan (penjaringan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala) yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar setingkat kelas 1 sampai dengan kelas 9 sebanyak 1 kali setiap tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah, dengan jenis pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan status gizi
- b. Pemeriksaan tanda-tanda vital
- c. Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut
- d. Pemeriksaan ketajaman penglihatan dan pendengaran

**6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif**

Realisasi capaian kinerja Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (15-59 Tahun) di Tahun 2021 sebesar 29,71% dari target 100%. Dinas Kesehatan Kota Pontianak wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia produktif adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi :





- 
- a. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut.
  - b. Pengukuran tekanan darah.
  - c. Pemeriksaan gula darah.
  - d. Anamnesa perilaku berisiko.

#### **7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut**

Realisasi capaian kinerja Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sebesar 56,91% dari target 100%. Dinas Kesehatan Kota Pontianak memberikan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar pada Warga Negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang sesuai standar adalah skrining kesehatan yang dilakukan minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun, terdiri dari:

- a. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut
- b. Pengukuran tekanan darah
- c. Pemeriksaan gula darah
- d. Pemeriksaan gangguan mental
- e. Pemeriksaan gangguan kognitif
- f. Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
- g. Anamnesa perilaku berisiko

#### **8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**

Dinas Kesehatan Kota Pontianak memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder dalam kurun waktu satu tahun. Adapun Realisasi Capaian di Tahun 2021 sebesar 20,72% dari target 100%.

Adapun Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi:

- a. Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat;
- c. Melakukan rujukan jika diperlukan.



Keterangan:

- Tekanan Darah Sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi farmakologi;
- Pelayanan kesehatan hipertensi diberikan kepada penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi di FKTP.

#### **9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**

Realisasi Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Tahun 2021 sebesar 37,84% dari target 100%. Dinas Kesehatan Kota Pontianak memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi :

- a. Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi;
- c. Melakukan rujukan jika diperlukan.

Keterangan:

Gula darah sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl ditambahkan pelayanan terapi farmakologi.

#### **10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**

Adapun Realisasi capaian kinerja Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat sebesar 58,06% dari target 100%. Dinas Kesehatan Kota Pontianak memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah Kota Pontianak dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia meliputi Pemeriksaan kesehatan jiwa dan Edukasi.



Mekanisme Pelayanan meliputi :

- a. Penetapan sasaran pada ODGJ berat;
- b. Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi:
- c. Pemeriksaan status mental
- d. Wawancara
- e. Edukasi kepatuhan minum obat;
- f. Melakukan rujukan jika diperlukan.

#### **11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**

Realisasi capaian kinerja Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Tahun 2021 sebesar 62.07% dari target 100% yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Dinas Kesehatan Kota Pontianak mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada pasien terduga TBC diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar meliputi :

- a. Pemeriksaan klinis
- b. Pemeriksaan penunjang
- c. Edukasi

Adapun Mekanisme Pelayanan :

- a. Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang yang kontak erat dengan penderita TBC dan di tetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. Pemeriksaan klinis  
Pelayanan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda;
- c. Pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan dahak dan/ atau bakteriologis dan/atau radiologis;
- d. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan;
- e. Melakukan rujukan jika diperlukan.



## **12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus/HIV)**

Dinas Kesehatan Kota Pontianak memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus/HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Realisasi Capaian Kinerja ini di Tahun 2021 yaitu sebesar 99.47% dari target 100%. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan resiko terinfeksi virus HIV meliputi : pemberian komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) tentang HIV termasuk promosi kesehatan penggunaan alat pencegahan yang efektif (kondom, lubrikan (pelumas), alat suntik steril, dll), pelayanan pemeriksaan laboratorium berupa skrining (deteksi dini) HIV, dan pelayanan konfirmasi diagnosis rujukan ke pelayanan pengobatan Anti Retroviral (ARV).

Orang dengan resiko terinfeksi virus HIV adalah :

- a. Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil;
- b. Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC;
- c. Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS;
- d. Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa;
- e. Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya



(heteroseksual, homoseksual atau biseksual);

- f. Transgender/waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual;
- g. Pengguna NAPZA suntik (Penasun) yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya;
- h. Warga binaan pemasyarakatan, yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap.



**Tabel. 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan  
Kota Pontianak Tahun 2021**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	√		100%	100%	100%	100%	90,12%	93,81%	100%	100%	<p>Dari beberapa Target Indikator baik dari SPM dan IKK yang tertuang ada beberapa yang tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh:</p> <p>a) Karena masih berlangsungnya Pandemi Covid 19 yang belum berakhir, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal yang berdampak pada capaian kinerja.</p> <p>b) Masih terbatasnya SDM Kesehatan yang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan indikator kinerja baik SPM maupun IKK, dan ditambah adanya beban penanganan kasus Covid 19 di masyarakat.</p> <p>c) Adanya kebijakan refocusing anggaran, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan</p>
2	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Persalinan	√		100%	100%	100%	100%	91,90%	92,57%	100%	100%	
3	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	√		100%	100%	100%	100%	91,69%	92,25%	100%	100%	
4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	√		100%	100%	100%	100%	69,70%	83,15%	100%	100%	
5	Persentase Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	√		100%	100%	100%	100%	47,54%	36,33%	100%	100%	



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

6	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	√		100%	100%	100%	100%	36,60%	29,71%	100%	100%	
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	√		100%	100%	100%	100%	51,82%	56,91%	100%	100%	
8	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	√		100%	100%	100%	100%	25,38%	20,72%	100%	100%	
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	√		100%	100%	100%	100%	42,35%	37,84%	100%	100%	
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	√		100%	100%	100%	100%	67,10%	58,06%	100%	100%	
11	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	√		100%	100%	100%	100%	46,09%	62,07%	100%	100%	
12	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	√		100%	100%	100%	100%	87,43%	99,47%	100%	100%	



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

Indikator Program (Outcome) Tahun 2021-2024 (Permendagri No.90 Tahun 2020)											
1	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Bayi Baru Lahir		√		87%	90%	95%		100%	90%	95%
2	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Balita		√		92%	95%	97%		100%	95%	97%
3	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelaksanaan Kesehatan Usia Anak Sekolah dan Remaja		√		92%	95%	97%		100%	95%	97%
4	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lansia		√		85%	90%	95%		100%	90%	95%
5	Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar		√		100%	100%	100%		100%	100%	100%
6	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan Reproduksi		√		100%	100%	100%		100%	100%	100%
7	Ratio Dokter, Perawat dan Bidan		√		2,3 Per 1.000 Penduduk	2,3 Per 1.000 Penduduk	2,3 Per 1.000 Penduduk		0,44	2,3 Per 1.000 Penduduk	2,3 Per 1.000 Penduduk
8	Persentase Faskes yang memenuhi SDM berkualitas sesuai standar		√		90%	90%	90%		100%	90%	90%





**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

9	Persentase Fasilitas Kesehatan Farmasi, makan, minuman sesuai standar		√		90%	90%	90%		112	90%	90%
10	Persentase Tatanan Kota Sehat yang telah dilaksanakan		√		90%	90%	90%		29	90%	90%
11	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap Pelayanan Kesekretariatan		√		80%	80%	80%		80	80%	80%
Indikator Program (Outcome) Tahun 2020 (Sesuai Permendagri No.13 tahun 2006)											
1	Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik		√		9%				6%		
2	Cakupan komplikasi neonatus yang ditangani		√		100%				73%		
3	Cakupan komplikasi kebidanan ditangani		√		100%				96%		
4	Persentase upaya kesehatan yang mendapatkan dukungan operasional		√		100%				100%		
5	Angka Bebas Jentik		√		100%				73%		
6	Cakupan Penemuan Terduga TBC yang dilakukan screening		√		100%				46%		



7	Persentase penderita kusta yang Release From Treatment (RFT)		√	100%				100%				
8	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		√	100%				7%				
9	Persentase Anak Usia 0-11 Bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap		√	94%				54%				
9	Persentase Jamaah Calon Haji yang terdeteksi faktor resiko kesehatan		√	100%				100%				
10	Cakupan Penemuan kasus non polio AFP		√	3				1,00				
11	Persentase Penyelidikan Epidemiologi (PE) < 24 jam pada Kelurahan yang mengalami KLB		√	100%				100%				
12	Persentase Kelurahan yang Open Defecation Free ( ODF )		√	45				55,00				
13	Persentase Sarana Air Minum yang memenuhi persyaratan sesuai standar		√	100%				100%				
14	Persentase Tempat fasilitas Umum yang memenuhi syarat kesehatan		√	78				75,00				



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

15	Persentase Tempat Pengolahan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan		√	34			60,00				
16	Persentase WUS Usia 30-50 Tahun yang Melakukan Pemeriksaan Deteksi Dini kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim		√	10%			1,00				
17	Cakupan Keluarga yang ber PHBS		√	60			65,00				
18	Persentase Sekolah yang melaksanakan PHBS		√	50			72,00				
19	Persentase Posyandu Purnama Mandiri		√	65			71,00				
20	Indeks Keluarga Sehat		√	22			22,00				
21	Persentase Balita dengan masalah gizi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		√	100%			84,00				
22	Persentase Bayi dengan Berat badan lahir rendah (BBLR) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		√	2			99,00				
23	Persentase Balita yang ditimbang Berat Badannya (D/S)		√	71			37,00				



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

24	Persentase Remaja Putri dapat tablet tambah darah		√	56				32,00			
25	Persentase Ibu hamil KEK dapat makanan tambahan		√	86				98,00			
26	Persentase Balita kurus dapat makanan tambahan		√	74				98,00			
27	Cakupan industri pangan Rumah tangga yang memiliki sertifikat PIRT		√	80				88,00			
28	Persentase Sarana farmasi sesuai standar		√	100%				100%			
29	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan kefarmasian sesuai standar		√	100%				100%			
30	Persentase Puskesmas yang menggunakan obat secara rasional		√	100%				100%			
31	Cakupan masyarakat miskin dan kelompok tertentu yang mendapat jaminan kesehatan		√	100%				97,00			
32	Persentase Sarana bangunan UPTD/UPK dan jaringannya yang memenuhi syarat		√	40				34,00			
33	Persentase jenis pelayanan kesehatan yang memiliki SP dan SOP		√	100%				100%			



34	Persentase puskesmas dan UPTD dengan ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan sesuai standar		√	100%				100%				
35	Jumlah UPTD/UPK yang memberikan pelayanan sesuai standar		√	25				25,00				
36	Persentase kecukupan data dan informasi kesehatan		√	100%				100%				
37	Persentase FKTP yang melaksanakan sistem informasi kesehatan		√	100%				100%				
38	Persentase kecukupan Sarana dan prasarana RSUD		√	100%				100%				
39	Persentase Sistem informasi RS dan Media Promosi Penyuluhan sesuai standar		√	71				76,00				
40	Persentase Sarana dan prasarana RSUD berfungsi dengan baik		√	100%				100%				
41	Persentase Rumah Sakit yang sudah melakukan simulasi Akreditasi Nasional		√	100%				-				
42	Persentase Tenaga kesehatan RS yang profesional, dan memenuhi standar kompetensi		√	81				100%				



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

---

43	Terwujudnya tata kelola administrasi dan manajemen RS		√	100%				100%				
44	Nilai tingkat kepuasan masyarakat		√	100%				94,00				

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2021



---

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan**

#### **1. Kinerja Pelayanan dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Pada Dinas Kesehatan**

Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan di seluruh sektor kehidupan. Berbagai perubahan ini turut menuntut penyesuaian-penyesuaian yang tidak hanya pada aspek kesehatan, sosial maupun ekonomi namun juga perencanaan pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi yang akan datang.

Dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan maupun program kegiatan yang berdampak pada kinerja pelayanan secara menyeluruh. Dinas Kesehatan Kota Pontianak melakukan koordinasi dan sinergisitas program kegiatan dengan Perangkat Daerah lain yang berkaitan serta Unit Pelayanan Tehnis yang berada di bawah Dinas Kesehatan serta masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Kerja Kesehatan dan kader kesehatan, agar capaian kinerja dapat terealisasi dengan maksimal.

Dinas Kesehatan Kota Pontianak juga melakukan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Fasilitas Kesehatan yang berada di bawah wilayah binaan Kota Pontianak baik yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan yang diberikan di beberapa Fasilitas Kesehatan sesuai dengan format yang telah ditetapkan maupun kerjasama dalam pelaksanaan rujukan pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tetap mengedepankan kualitas layanan serta penegakan protokol kesehatan yang disiplin. Dimasa Pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum berakhir memerlukan pembiayaan kesehatan yang sangat besar, sehingga diperlukan strategi dalam perencanaan pembiayaan kesehatan agar efektif dan efisien. Terjadinya krisis kesehatan yang dikarenakan bencana Pandemi Covid-19 seperti kekurangan oksigen, obat-obatan, alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya sangat berdampak terhadap pencapaian realisasi capaian kinerja pada Dinas Kesehatan.



2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak

Secara umum permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan Tugas Fungsi di masa Pandemi Covid-19 dapat diatasi dengan baik dengan mengoptimalkan sumber daya dan sumber dana yang ada. Terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam memberikan pelayanan di masa Pandemi Covid-19 antara lain :

- a. Multitasking yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di lapangan. Selain menangani Wabah Covid-19 yang menjadi masalah di tahun 2020 sampai dengan sekarang. Dinas Kesehatan juga diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan program prioritas Kementerian Kesehatan yang juga memiliki dampak yang besar dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera;
- b. Kebijakan Refocusing anggaran yang berakibat terjadinya perubahan rencana kegiatan yang sudah dilakukan;
- c. Keterbatasan sediaan BHP medis dan obat-obatan selama masa pandemi Covid-19.

Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi pada Dinas Kesehatan, yaitu :

- a. Perubahan sistem penganggaran keuangan dari Simakda ke SIPD;
  - b. Kepercayaan Masyarakat terkait dengan Pandemi Covid-19;
  - c. Penolakan Vaksinasi Covid-19 oleh sebagian kelompok masyarakat;
  - d. Sistem pengadaan Barang Jasa untuk pagu di bawah kurang dari 200 juta melalui elektronik pengadaan yang memerlukan waktu;
  - e. Kekhawatiran masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan di masa Pandemi Covid-19 sehingga berdampak kepada capaian realisasi program-program prioritas.
3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Terkait dengan dampak pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah pada masa Pandemi covid-19 yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, secara umum masih bisa kendalikan dengan baik dan terkait dengan





beberapa program yang menjadi sasaran kinerja Kepala Daerah yaitu yang berhubungan dengan Angka Harapan Hidup dan Angka Stunting di Kota Pontianak masih berada di bawah angka Nasional berdasarkan hasil survei Pemantauan Status Gizi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Dimana Angka Stunting Tahun 2021 di Kota Poantianak berdasarkan hasil survey Penilaian Status Gizi (PSG) sebesar 12,38% dari target yang ditetapkan sebesar 18%.

4. Tantangan dan peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pontianak

Tantangan yang dihadapi Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam meningkatkan Pelayanan di masa Pandemi Covid-19 antara lain :

1. Kuantitas dan Kualitas SDM kesehatan yang perlu di tingkatkan terutama dalam menangani pasien Covid-19 baik di masyarakat, fasilitas kesehatan dasar (Puskesmas) maupun fasilitas kesehatan rujukan (Rumah Sakit);
2. Persepsi masyarakat yang beragam terkait dengan pandemi Covid-19 perlu mendapatkan informasi yang benar dan jelas. Peluang yang dimiliki Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan di masa Pandemi Covid-19 antara lain :
  - a) Bantuan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan yang dapat mensupport dalam penyediaan anggaran bagi pelaksanaan penanganan Covid-19 di Puskesmas;
  - b) Adanya kebijakan Dari Pusat terkait dengan Dana Refocusing yang mendukung dalam penanganan pandemi Covid-19 di Daerah;
  - c) Adanya kerjasama dari Perangkat Daerah lain, Stakeholder serta Pihak ke tiga yang berkontribusi dalam menunjang pemberian layanan di masa Pandemi Covid-19.

5. Formulasi Isu-Isu Penting

Adapun Formulasi isu-isu penting Dinas Kesehatan Kota Pontianak pada tahun 2021, dapat kami sampaikan pada Tabel 2.3, sebagai berikut :



**Tabel 2.4**  
Formulasi Isu – isu Penting Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2021

No	Isu - Isu Penting	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut
1.	Covid-19 yang masih ada	Pengusulan anggaran untuk kegiatan penanganan Covid-19 Tahun 2023	Mengusulkan anggaran Covid-19 Pada Dinas Kesehatan Tahun 2023
2.	Operasional RS Pontianak Utara diperkirakan mencapai Rp. 21,316,269,900	Perlu di usulkan Telaah Staf kebutuhan anggaran RSUD Pontianak UtaraPengusulan anggaran untuk tahun 2023	Telah disetujui Usulan tambahan operasional Rumah Sakit Pontianak Utara yang awalnya RP. 6,000,000,000 kemudian diberikan penambahan anggaran sebesar Rp. 4,303,192,865, sehingga total anggaran untuk Operasional RS Pontianak Utara Tahun 2023 sebesar Rp. 10,303,192,865
3.	Pembangunan Puskesmas	Usulan pembangunan Puskesmas Siantan Hilir yang terhenti alokasi anggarannya pada perubahan anggaran Tahun 2022, dan Pembangunan Puskesmas Tambelan Sampit dengan kondisi bangunan rusak berat	Telah di setujuji usulan anggaran Pembangunan Puskesmas Siantan Hilir dalam Kebijakan Umum Anggaran sebesar Rp. 5,000,000,000,- dan Pembangunan Puskesmas Tambelan Sampit sebesar Rp. 7,350,000,000,- menggunakan Dana Insentif Daerah
3.	Penyelesaian DAK Fisik T.A 2021 yang belum selesai	Pengusulan Penyelesaian Progress Bangunan dengan usulan anggaran di Tahun 2023	Usulan Anggaran untuk Menyelesaikan Ruang Operasi RS Kota yang belum selesai di Tahun 2021 sebesar Rp. 9.M

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2022



#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dari Tabel. 2.4, dapat dilihat perbandingan rancangan awal RKPD Dinas Kesehatan Kota Pontianak, dan catatan penting terkait hasil analisis kebutuhan di Tahun 2023, sebagai berikut :



**Tabel.2.5  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023  
Kota Pontianak**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kota Pontianak

No	Rancangan Awal RKPD (Tahun 2023)					Hasil Analisis Kebutuhan (Tahun 2023)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Pontianak	Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan Pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir	95%	211.604.483.181	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Pontianak	Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan Pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir	95%	211.604.483.181	1) Untuk saat ini RS Siantan Hilir belum bisa diusulkan sebagai RS bersumber dana BLUD, sehingga untuk Biaya operasional rutin masih perlu dukungan anggaran bersumber dana APBD;
			Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan kesehatan balita	97%				Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan kesehatan balita	97%		
			Persentase Puskesmas yg melaksanakan usia anak	97%				Persentase Puskesmas yg melaksanakan usia anak sekolah dan remaja	97%		





**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

		obat, BMHP, dan Alkes sesuai standar				obat, BMHP, dan Alkes sesuai standar			
1.2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		1) Akreditasi Fasilitas Kesehatan	100% (utama/pari purna = 6 puskesmas)	177.755.432.261	1.2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1) Akreditasi Fasilitas Kesehatan	100% (utama/pari purna = 6 puskesmas)	177.755.432.261	dan Kegiatan yang telah direncanakan, sehingga terdapat beberapa Program dan Kegiatan yang difokusir atau dialihkan kepada kegiatan pendukung penurunan Covid-19; 4) Anggaran terkait BPJS kurang sehingga tidak mampu untuk dibayarkan bagi peserta PBI di Kota Pontianak 5) Untuk Sub. Kegiatan yang
		2) Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%			2) Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	Tambahan : Rp. 16 M (Operasional Pelayanan RS. Siantan Hilir)	
		3) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%			3) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	Tambahan : Rp. 2 M (Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat)	
		4) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%			4) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	Tambahan : Rp. 1 M (Operasional Pelayanan 25 UPTD/UPK)	



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

			5)Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100%				5)Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100%	Tambahan : Rp. 250 jt x 12 SPM = 3 M (Pengampu Sub. Kegiatan SPM yang ada)	mengamp u Kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) perlu ditambahk an untuk meningkat kan Pelayanan Kesehata n Masyarakat (mengingat SPM termasuk salah satu Kinerja Pemkot yang harus di utamakan)
			6)Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%				6)Persentas e anak usia pendidikan dasar yang mendapatk an pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
			7)Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatk an skrining kesehatan sesuai standar	100%				7)Persentas e orang usia 15–59 tahun mendapatk an skrining kesehatan sesuai standar	100%		
			8)Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatk an skrining kesehatan sesuai standar	100%				8)Persentas e warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatk an skrining kesehatan sesuai standar	100%		
			9)Persentase penderita Hipertensi yang mendapatk	100%				9)Persentas e penderita Hipertensi yang mendapatk an pelayanan	100%		



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

			an pelayanan kesehatan sesuai standar				kesehatan sesuai standar		
			10)Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			10)Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
			11)Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%			11)Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	
			12)Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%			12)Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	
			13)Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan	100%			13)Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini	100%	





**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

			deteksi dini HIV sesuai standar				HIV sesuai standar		
			14)Persentase anak usia 0- 11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	95%			14)Persentase anak usia 0- 11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	95%	
			15)Persentase jemaah calon haji yang terdeteksi faktor resiko kesehatan	100%			15)Persentase jemaah calon haji yang terdeteksi faktor resiko kesehatan	100%	
			16)Persentase penanggulangan KLB yang direspn < 24 jam	100%			16)Persentase penanggulangan KLB yang direspn < 24 jam	100%	
			17)Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	2 per 1000 Penduduk			17)Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	2 per 1000 Penduduk	
			18)Persentase RS rujukan tingkat Kab/Kota yang	100%			18)Persentase RS rujukan tingkat Kab/Kota yang	100%	



			terakreditasi				yang terakreditasi		
			19)Persentase masyarakat miskin dan tidak mampu serta kelompok tertentu memperoleh jaminan kesehatan	100%			19)Persentase masyarakat miskin dan tidak mampu serta kelompok tertentu memperoleh jaminan kesehatan	100%	
			20)Persentase pemeriksaan crosscek slide TBC	100%			20)Persentase pemeriksaan crosscek slide TBC	100%	
	1.3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Persentase FKTP dan FKRTL yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan	80%	520.237.179	1.3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase FKTP dan FKRTL yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan	80%	520.237.179
	1.4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Rumah Sakit Kota Pontianak yang terakreditasi	100%	385.927.333	1.4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rumah Sakit Kota Pontianak yang terakreditasi	100%	385.927.333



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

			Penyediaan Biaya Operasional IRS	100%				Penyediaan Biaya Operasional RS	100%	
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Pontianak	Ratio Dokter, Perawat, dan Bidan	2,3 per 1.000 Penduduk	896.773.358	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Pontianak	Ratio Dokter, Perawat, dan Bidan	2,3 per 1.000 Penduduk	896.773.358
			Persentase Faskes yang memenuhi SDM berkualitas sesuai standar	90%				Persentase Faskes yang memenuhi SDM berkualitas sesuai standar	90%	
	1.1) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase praktek tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100%	381.482.351	1.1) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase praktek tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100%	381.482.351
	1.2) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis		Persentase pelaksanaan UKOM bagi tenkes	100%	515.291.007	1.2) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber		Persentase pelaksanaan UKOM bagi tenkes	100%	515.291.007



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

	Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Kota Pontianak	Persentase Fasilitas Kesehatan Farmasi, makan, minuman sesuai standar	90%	327.871.203	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Kota Pontianak	Persentase Fasilitas Kesehatan Farmasi, makan, minuman sesuai standar	90%	327.871.203
	1.1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin operasional	85%	-	1.1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin operasional	85%	-
	1.2) Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat		Persentase Jumlah Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan	100%	101.323.981	1.2) Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan		Persentase Jumlah Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan	100%	101.323.981



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

	Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 yang memiliki ijin operasional			Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 yang memiliki ijin operasional		
	1.3)Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Persentase Jumlah Industri Rumah Tangga yang baru dan telah habis masa ijinnya untuk memiliki ijin operasional	100%	101.323.981	1.3)Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Persentase Jumlah Industri Rumah Tangga yang baru dan telah habis masa ijinnya untuk memiliki ijin operasional	100%	101.323.981
			Persentase pelaku usaha yang memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan	100%				Persentase pelaku usaha yang memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan	100%	



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

	1.4) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaa n Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Resto ran dan Depot Air Minum (DAM)		Persentase TPM yang terdaftar memiliki sertifikat laik sehat	85%	101.323.981	1.4) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Resto ran dan Depot Air Minum (DAM)		Persentase TPM yang terdaftar memiliki sertifikat laik sehat	85%	101.323.981
	1.5) Pemeriksaa n dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaa n Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Persentase Pemeriksaa n dan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaa n post market pada produksi dan produk makanan minuman industri Rumah Tangga	100%	-	1.5) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri Rumah Tangga	100%	-
4	Program Pemberdaya aan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kota Ponti anak	Persentase tatanan kota sehat yang telah dilaksana kan	90%	349.690.000	Program Pemberdaya aan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kota Pontia nak	Persentase tatanan kota sehat yang telah dilaksanakan	90%	349.690.000



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

	1.1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor dibidang kesehatan	100%	349.690.000	1.1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor dibidang kesehatan	100%	349.690.000
	PROGRAM RUTIN					PROGRAM RUTIN				
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	80%	138.185.426.026	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	80%	138.185.426.026
	1.1)Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	270.390.159	1.1)Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	270.390.159



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

1.2) Administ rasi Keuangan Perangkat Daerah		Jangka waktu penyeleng garaan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	123.904.283.003	1.2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jangka waktu penyeleng garaan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	123.904.283.003
1.3) Adminis trasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jangka waktu penyeleng garaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12 Bulan	105.572.500	1.3) Administ rasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jangka waktu penyeleng garaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12 Bulan	105.572.500
1.4) Adminis trasi Umum Perangkat Daerah		Jangka waktu penyeleng garaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	6.499.080.370	1.4) Administ rasi Umum Perangkat Daerah		Jangka waktu penyeleng garaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	6.499.080.370
1.5) Pengad aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Unit	3.041.833.520	1.5) Pengada an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Unit	3.041.833.520
1.6) Penyedi aan Jasa Penunjang Urusan Pemerint ah Daerah		Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan	12 Bulan	3.166.641.473	1.6) Penyedia an Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah		Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan	12 Bulan	3.166.641.473





**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

			pemerintah daerah					pemerintah daerah		
	1.7)Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	48 Unit	1.085.700.000	1.7)Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	48 Unit	1.085.700.000
			Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	6 Unit	111.925.000			Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	6 Unit	111.925.000
	Jumlah				351.364.243.768	Jumlah				388.364.243.768

Sumber : Dinas Kesehatan , 2022



## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rumusan program dan kegiatan yang diusulkan pada RKPD Tahun 2022 sudah menuangkan fungsi dan tugas pokok Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan indikator sasaran, indikator program yang tertuang dalam RPJMD tahun 2020 – 2024, SDG's dan SPM-Kesehatan. Secara garis besar program dan kegiatan berbeda dari tahun sebelumnya. Dalam penyusunan dokumen perencanaan Program dan kegiatan disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jumlah anggaran dibandingkan dengan rancangan awal RKPD dimasing-masing program & kegiatan telah menyesuaikan kebutuhan yang direncanakan. Secara lebih rinci dituangkan dalam Tabel 2.5, sebagai berikut:

**Tabel. 2.6  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2023 Kota Pontianak**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kota Pontianak

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume (%)	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	Kota Pontianak	Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan Pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir	95	
			Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan kesehatan balita	97	
			Persentase Puskesmas yg melaksanakan usia anak sekolah dan remaja	97	
			Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan pelayanan kesehatan lansia	95	
			Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	100	
			Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan reproduksi	100	
	1.1)Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		Persentase fasilitas kesehatan pemerintah sesuai standar	100	Usulan ASMAS pada Musrenbang 2023 renovasi Pusk Khatulistiwa, Pembangunan



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

					Puskesmas Pembantu di Batu Layang, serta Usulan Ambulance Pusk. Khatulistiwa akan di usulkan melalui DAK 2023
			Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah UPTD/UPK yang memiliki obat, BMHP, dan Alkes sesuai standar	100	
1.2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1) Akreditasi Fasilitas Kesehatan	100% (utama/paripurna = 6 puskesmas)		
		2) Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100		
		3) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100		
		4) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100		
		5) Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100		
		6) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100		
		7) Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100		
		8) Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100		
		9) Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100		
		10) Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100		
		11) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100		
		12) Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100		
		13) Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV	100		
		mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100		



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

			14)Persentase anak usia 0- 11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	100	
			15)Persentase jemaah calon haji yang terdeteksi faktor resiko kesehatan	100	
			16)Persentase penanggulangan KLB yang direspon < 24 jam	100	
			17)Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	2 per 1000 Penduduk	
			18)Persentase RS rujukan tingkat Kab/Kota yang terakreditasi	100	
			19)Persentase masyarakat miskin dan tidak mampu serta kelompok tertentu memperoleh jaminan kesehatan	100	
			20)Persentase pemeriksaan croscek slide TBC	100	
	1.3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Persentase FKTP dan FKRTL yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan	80	
	1.4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rumah Sakit Kota Pontianak yang terakreditasi	100	
			Penyediaan Biaya Operasional RS	100	
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	Kota Pontianak	Ratio Dokter, Perawat, dan Bidan	2,3 Per 1.000 Penduduk	
			Persentase Faskes yang memenuhi SDM berkualitas sesuai standar	90	
	1.1 )Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase praktek tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100	
	1.2 ) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaksanaan UKOM bagi tenkes	100	
<b>3</b>	<b>Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</b>	Kota Pontianak	Persentase Fasilitas Kesehatan Farmasi, makan, minuman sesuai standar	90	
	1.1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin operasional	85	



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

	1.2) Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		Persentase Jumlah Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 yang memiliki ijin operasional	100	
	1.3)Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Persentase Jumlah Industri Rumah Tangga yang baru dan telah habis masa ijinnya untuk memiliki ijin operasional	100	
			Persentase pelaku usaha yang memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan	100	
	1.4) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Persentase TPM yang terdaftar memiliki sertifikat laik sehat	85	
	1.5) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri Rumah Tangga	100	
<b>4</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>	Kota Pontianak	Persentase tatanan kota sehat yang telah dilaksanakan	90	
	1.1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor dibidang kesehatan	100	
<b>5</b>	<b>PROGRAM RUTIN</b>				
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Pontianak	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	80	
	1.1)Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	10	
	1.2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12	
	1.3)Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12	



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

1.4)Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12	
1.5)Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6	
1.6)Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12	
1.7)Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	48	
	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	6	

Sumber : Dinas Kesehatan,2022



## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional merupakan penelaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Kebijakan Nasional sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan yang menjadi tolak ukur target pencapaian kinerja kesehatan di Kota Pontianak. Adapun isu kesehatan yang menjadi fokus Kementerian Kesehatan di Tahun 2021 adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pencegahan Stunting, Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), Peningkatan Pengendalian Penyakit baik menular maupun tidak menular serta penguatan *health security* untuk penanganan pandemi, Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), serta Peningkatan sistem kesehatan nasional.

Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan Dinas Kesehatan. Visi Kementerian Kesehatan sebagaimana yang tertuang dalam rancangan awal Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 adalah **“Menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan”**. Sedangkan Misi Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
2. Menurunkan angka stunting pada balita.
3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional.



4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan juga menjadi perhatian penting bagi Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam menetapkan indikator tujuan, indikator sasaran dan indikator program, dan menjadi acuan dalam rangka penyusunan perencanaan tahunan Dinas Kesehatan. Perencanaan tahunan tersebut disusun dengan memperhatikan unsur integrasi dan sinergi sehingga ada keterkaitan antar dokumen perencanaan yang sudah disusun.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan**

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Dinas Kesehatan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Dinas Kesehatan. Adapun tujuan dan sasaran Rancangan awal rencana kerja Dinas Kesehatan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

#### *A. Tujuan*

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Dinas Kesehatan Kota Pontianak selama 5 tahun anggaran dari tahun 2020-2024 adalah **“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”**. Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

1. Angka harapan Hidup
2. Angka Stunting Balita

#### *B. Sasaran Strategis*

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam kurun waktu (5) lima





tahun adalah **“Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat”**. Dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Angka Kematian Ibu
2. Angka Kematian Bayi
3. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
4. Insiden Rate HIV
5. Insiden Rate DBD
6. Prevalensi penderita Hipertensi di Kota Pontianak
7. Prevalensi penderita Diabetes Melitus di Kota Pontianak
8. Angka Wasting Balita
9. Angka Underweight Balita
10. Angka Stunting Balita

Berikut Tabel Tujuan dan Sasaran beserta Indikator Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2021-2024, adalah sebagai berikut :

**Tabel. 3.1**  
Tujuan, Sasaran beserta Indikator Perubahan RENSTRA  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2021-2024

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Satuan	Target Capaian setiap tahun				Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>A</b>	<b>Tujuan</b>							
1	Angka Harapan Hidup	72,82	Tahun	73,01	73,19	73,36	73,54	73,54
2	Angka Stunting Balita	17,04	%	18,00	17,00	16,00	14,00	14,00
<b>B</b>	<b>Sasaran</b>							
1	Angka Kematian Ibu	49,66	per 100,000 KH	49,50	48,50	48,00	47,50	47,50



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

2	Angka Kematian Bayi	2,48	per 1,000 KH	2,30	2,25	2,23	2,00	2,00
3	Persentase Orang Terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Insiden Rate HIV	0,020	%	0,019	0,019	0,018	0,018	0,018
5	Insiden Rate DBD	30,58	per 100,000 pddk	< 49	< 49	< 49	< 49	< 49
6	Prevalensi Penderita Hipertensi di Kota Pontianak	32,80	%	28,00	27,00	26,00	25,00	25,00
7	Prevalensi Penderita Diabetes Melitus di Kota Pontianak	2,70	%	2,50	2,40	2,30	2,20	2,20
8	Angka Wasting Balita	21,54	%	7,80	7,50	7,30	7,00	7,00
9	Angka Underweight Balita	14,25	%	13,00	12,00	11,00	10,00	10,00
10	Angka Stunting Balita	17,04	%	18,00	17,00	16,00	14,00	14,00

*Sumber : Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2021*

### 3.3. Program dan Kegiatan

#### 1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Adapun bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Pontianak, yaitu sebagai berikut :

- a. Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi walikota, maka indikator tujuan yang dipilih sesuai dengan indikator sasaran dari RPJMD Kota Pontianak, yaitu berupaya meningkatkan Angka Harapan Hidup masyarakat dan menurunkan Angka Stunting Balita di Kota Pontianak.
- b. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan juga menjadi salah pertimbangan dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Pontianak, yang juga merupakan salah satu penentu keberhasilan capaian kinerja pemerintah daerah Kota Pontianak, dimana Dinas Kesehatan berupaya untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan.



Adapun Jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan, terdiri atas : (Berdasarkan PMK No.4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan)

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus
10. Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat
11. Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis; dan
12. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

Berikut 12 Indikator beserta target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan, yaitu :

**Tabel. 3.2**  
Jenis Pelayanan dan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)  
Bidang Kesehatan Tahun 2021-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Satuan	Target Capaian setiap tahun			
				2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil	%	100	100	100	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Persalinan	%	100	100	100	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

4	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	%	100	100	100	100
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai Standar	%	100	100	100	100
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang Usia 15 - 59 Tahun mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	%	100	100	100	100
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	%	100	100	100	100
8	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Persentase Penderita Hipertensi mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	100
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase Penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	%	100	100	100	100
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar	%	100	100	100	100
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Persentase Orang Terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar	%	100	100	100	100
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).	Persentase Orang dengan risiko Terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan deteksi dini HIV sesuai Standar	%	100	100	100	100

Sumber : Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 4 , 2019

- c. Dalam mendukung pengentasan kemiskinan tingkat Kota Pontianak. Dinas Kesehatan melalui program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan, yang berada pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub. Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat telah menjamin penduduk miskin



di Kota Pontianak mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.

- d. Melanjutkan kegiatan inovatif terkait penanggulangan virus Covid-19 di Kota Pontianak.
- e. Diperlukan sistem surveilans dan sistem informasi kesehatan untuk perencanaan yang berbasis data dan informasi yang akurat.
- f. Meningkatkan jejaring kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor dan menjalin kemitraan dengan masyarakat dan kalangan swasta.
- g. Meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan Rumah Sakit di Daerah Kota Pontianak.

## **2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan**

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan, dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2023 dirumuskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan memiliki 4 (empat) program wajib dan 12 (dua belas) kegiatan, serta 1 (satu) program rutin dan 7 (tujuh) kegiatan. Berikut Tabel. Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan Kota Pontianak, yaitu : (Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah).



**Tabel. 3.3**  
Nama Program, Kegiatan, dan Sub.Kegiatan  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2021-2024

Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	
(1)	(2)	(3)	
<b>1)Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota</b>	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
		2	Pembangunan Puskesmas
		3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan (RSUD Pusk. Siantan Hilir)
		5	Pengembangan Puskesmas
		6	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		7	Rehabilitasi dan pemeliharaan RS (RSUD Sultan Syarif Moehammad Al Kadrie)
		8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
		9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		10	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD Sultan Syarif Moehammad Al Kadrie)
		11	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

			Kesehatan (RSUD Sultan Syarif Moehammad Al Kadrie)
		12	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		13	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSUD Sultan Syarif Moehamad Al-Kadrie
		14	Pengadaan Obat, Vaksin
		15	Pengadaan Obat, Vaksin RSUD Sultan Syarif Moehamad Al-Kadrie
		16	Pengadaan Bahan Habis Pakai
		17	Pengadaan Bahan Habis Pakai RSUD Sultan Syarif Moehamad Al-Kadrie
		18	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	<b>2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

		5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Diabetes Melitus
		10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
		11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
		13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat RSUD Sultan Syarif Moehamad Al-Kadrie
		15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
		16	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
		17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
		18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan RSUD Sultan Syarif Moehamad Al-Kadrie
		19	Surveilans Kesehatan





**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

		20	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis kesehatan
		21	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
		22	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		23	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		24	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RSUD Pusk. Siantan Hilir)
		25	Operasional Pelayanan Rumah Sakit RSUD Sultan Syarif Moehamad Al-Kadrie
		26	Operasional Pelayanan 25 UPTD/UPK
		27	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
		28	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota RSUD Sultan Syarif Moehamad Al-Kadrie
	3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
		2	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (RSUD Sultan Syarif Moehamad Al Kadrie)
		3	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
		4	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (RSUD Sultan Syarif Moehamad Al Kadrie)



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

	4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
		2	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya
<b>2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	1) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
	2) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</b>	1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak lanjut Pengawasan izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	2) Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	2	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
		3	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

	3)Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
	4) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
	5) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
<b>4)Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>	1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	1)Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2)Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	3)Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
	4)Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5)Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

	6)Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	7)Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	8)Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber : Permendagri No.90 Tahun 2019, 2019



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN**

#### **4.1 Rencana Kerja**

Dengan mengacu pada tujuan, sasaran, dan strategi untuk mewujudkan sasaran kinerja organisasi dan indikator sebagai tolok ukur keberhasilan, maka Dinas Kesehatan Kota Pontianak menetapkan Rencana Program, Kegiatan, sub kegiatan Tahun Anggaran 2023 beserta indikator dan target sebagaimana tercantum pada Tabel berikut berikut dibawah ini :



**Tabel 4.1**

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024  
Kota Pontianak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023 (Rp)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			Lok	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	02											
1	02	01										
1	02	01	2.01									
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun		12 dokumen	36,571,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	12 dokumen	36,571,500
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 Laporan	47,985,150	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	12 Laporan	65,150,000



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

1	02	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>144,431,129,550</b>				<b>144,909,128,350</b>
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1066 Orang/bulan	<b>134,130,000,000</b>	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1066 Orang/bulan	134,130,000,000
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinkes + RSUD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	563,685,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Dokumen	563,685,000
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinkes + RSUD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	9,522,001,200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Dokumen	10,000,000,000
1	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 Dokumen	215,443,350	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Dokumen	215,443,350
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD		0 Laporan	0			0 Laporan	
1	02	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>129,750,000</b>				<b>116.129.750</b>
1	02	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan	129,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Laporan	116.129.750
1	02	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>307,630,029</b>				<b>342,510,029</b>
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	20,422,078	Dana Transfer Umum-Dana Bagi		1 Paket	20,422,078





**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

									Hasil			
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	89,685,333	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	1 Paket	89,685,333
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		2 Paket	38,266,943	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	2 Paket	38,266,943
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket	83,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3 Paket	116,730,000
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	42,993,675	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	1 Paket	42,993,675
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Paket	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	2 Paket	4,000,000
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	30,412,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	12 Laporan	30,412,000
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>432,327,110</b>			<b>4,696,016,872</b>
1	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0 Unit	0		3 unit	1,350,000,000
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		68 Unit	432,327,110	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	68 Unit	3,346,016,872



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

1	02	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>6,658,854,720</b>				<b>6,658,854,720</b>
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	2,104,633,481	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Laporan	2,104,633,481
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (RSUD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	<b>4,554,221,239</b>	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		0 Laporan	4,554,221,239
1	02	01	2.09		<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>824,125,022</b>			48 Unit	<b>824,125,022</b>
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		12 Unit	489,236,562	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Unit	489,236,562
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		107 Unit	94,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		107 Unit	94,100,000
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	240,788,460	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Unit	240,788,460
1	02	02			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>				<b>182,686,468,087</b>				208,768,986,358
1	02	02	2.01		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>32,853,792,884</b>				<b>58,430,844,415</b>



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas (Tambahkan Sian-Hilir 5 M)	Jumlah Puskesmas yang dibangun	2 unit	23,381,811,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Insentif Daerah	2 unit	23,381,811,000
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	4 unit	1,203,006,308		4 unit	11,835,278,861
1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas yang dibangun	5 unit	0		5 unit	3,000,000,000
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang dilakukan pengembangan	2 unit	1,817,302,994		2 unit	13,440,978,400
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	2 unit	0		2 unit	-
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas lainnya yang dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	0 unit	0		0 unit	-
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	6 Unit	2,505,373,767	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	6 Unit	2,505,373,767



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan		2 Paket	3,582,552,600	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	2 Paket	3,903,656,172
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan		3 Paket	285,323,490	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	3 Paket	285,323,490
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		6 Unit	78,422,725	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	6 Unit	78,422,725
1	02	02	2.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>149,359,786,654</b>			<b>149,626,588,761</b>
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		12527 Orang	241,872,634	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	12527 Orang	241,872,634



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11958 Orang	162,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	11958 Orang	162,500,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11388 Orang	40,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	11388 Orang	306,802,107
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	57107 Orang	94,966,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	57107 Orang	94,966,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	96730 Orang	28,950,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	96730 Orang	28,950,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	462589 Orang	49,550,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	462589 Orang	49,550,000
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	66193 Orang	53,048,790	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	66193 Orang	53,048,790
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	167643 Orang	21,789,200	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	167643 Orang	21,789,200



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13791 Orang	1,767,121,200	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	13791 Orang	1,767,121,200
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1407 Orang	11,512,594	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	1407 Orang	11,512,594
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah kader TBC yang ditingkatkan kapasitasnya	60 orang	0		60 orang	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15467 Orang	610,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	15467 Orang	610,000,000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dinkes + RSUD)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	2,080,151,172	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Bagi Hasil	12 Dokumen	2,080,151,172



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

										Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan			
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		12 Dokumen	223,867,513	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		12 Dokumen	223,867,513
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		12 Dokumen	170,651,884	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		12 Dokumen	170,651,884
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		12 Dokumen	262,864,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		12 Dokumen	262,864,000
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		12 Dokumen	32,563,512	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		12 Dokumen	32,563,512



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		12 Dokumen	1,693,648,090	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pelayanan Kesehatan		12 Dokumen	1,693,648,090
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		12 Dokumen	874,779,900	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pelayanan Kesehatan		12 Dokumen	874,779,900
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		12 laporan	16,302,500,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pembayaran Iuran JKN Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		12 laporan	16,302,500,000
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Pontura)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		12 Dokumen	10,303,192,865	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	10,303,192,865
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (BLUD) RSUD SSMA	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		12 Dokumen	67,870,525,174	Pendapatan dari BLUD		12 Dokumen	67,870,525,174





**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (APBD,BLUD, BOK)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen	41,971,528,898	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Transfer Khusus-Pendapatan dari BLUD		12 Dokumen	41,971,528,898
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (BKMM)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		12 Dokumen	2,882,260,236	Pendapatan dari BLUD		12 Dokumen	2,882,260,236
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Labkesda)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		12 Dokumen	942,440,692	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Dokumen	942,440,692
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		94 Unit	295,123,300	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		94 Unit	295,123,300
1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		1 Unit	372,379,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1 Unit	372,379,000
1	02	02	2.03		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>				<b>275,000,000</b>				<b>513,664,633</b>
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		12 Dokumen	62,731,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		12 Dokumen	301,395,633



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		12 Dokumen	212,269,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		12 Dokumen	212,269,000
													-
1	02	02	2.04		<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>197,888,549</b>				<b>197,888,549</b>
1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya		12 RS	40,503,900	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		12 RS	40,503,900
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		94 Unit	157,384,649	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		94 Unit	157,384,649
													-
													-
1	02	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>				<b>65,270,000</b>				<b>268,878,000</b>
1	02	03	2.02		<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>				<b>31,400,000</b>				<b>235,008,000</b>



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	31,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	12 Dokumen	235,008,000
1	02	03	2.03		<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>33,870,000</b>			<b>33,870,000</b>
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	80 Orang	33,870,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	80 Orang	33,870,000
1	02	04			<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>			<b>679,437,697</b>			<b>690,573,249</b>
1	02	04	2.01		<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>			<b>422,262,710</b>			<b>422,262,710</b>
1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	225 Sarana	422,262,710	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	225 Sarana	422,262,710
1	02	04	2.02		<b>Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</b>						



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

1	02	04	2.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	0 Dokumen	0		0 Dokumen	
1	02	04	2.03		<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>			100,320,827			111,456,379
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	12 Dokumen	100,320,827	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	12 Dokumen	111,456,379
1	02	04	2.04		<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>			156,854,160			156,854,160
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12 Dokumen	156,854,160	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	12 Dokumen	156,854,160
1	02	04	2.06		<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>			0			



**Rencana Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Pontianak  
Tahun 2023**

1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	0 Unit	0		0 Unit	
1	02	05			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>			<b>235,200,000</b>			<b>235,200,000</b>
1	02	05	2.01		<b>Peningkatan Upaya Promosi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>235,200,000</b>			<b>235,200,000</b>
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 dokumen	235,200,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pelayanan Kesehatan	12 dokumen	235,200,000
					<b>Jumlah sub kegiatan</b>			<b>69</b>			
					<b>Jumlah Kegiatan</b>			<b>20</b>			
					<b>Jumlah Program</b>			<b>5</b>			
					<b>Jumlah Total Pagu Anggaran Tahun 2023</b>			<b>336,534,748,865</b>			<b>367,495,994,100</b>



Berdasarkan Surat Edaran Wali kota Pontianak Nomor 050 / 168 / Bappeda / 2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, maka ditetapkan pagu tentative pada rancangan awal Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kesehatan Kota Pontianak untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp. 323,291,156,000. Kemudian berdasarkan Surat Edaran Wali Kota per Juni 2022 di tetapkan Kebijakan Rancangan Akhir RKPD Kota Pontianak dengan Pagu Definitif untuk Dinas Kesehatan Kota Pontianak adalah sebesar **Rp. 336,534,748,865,-**.

#### **4.2 Pendanaan**

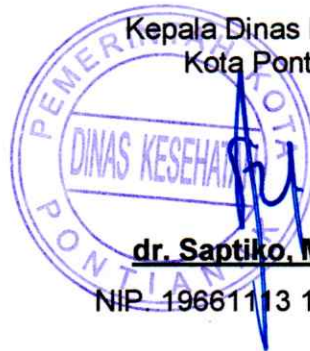
Pendanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan dari rancangan awal hingga rancangan akhir anggaran. Adapun perubahan pagu dari rancangan awal ke rancangan akhir sesuai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada Dinas Kesehatan terdapat pada penambahan pagu untuk penyediaan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baik penambahan pada Gaji pokok maupun pada Tunjangan Penghasilan Pegawai sebesar Rp. 3,940,400,000,-, dimana pada Tahun anggaran 2023 ditetapkan alokasi tenaga PPPK sebanyak 60 (enam puluh) orang. Kemudianm penambahan pagu pada rancangan akhir anggaran Dinas Kesehatan juga terdapat pada penambahan anggaran Pembangunan Puskesmas Siantan Hilir sebesar Rp. 5,000,000,000,- dan Tambahan anggaran untuk Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Pontianak Utara (RSUD Pontianak Utara) dengan nilai pagu sebesar Rp. 4,303,192,865,-. Sehingga total penambahan anggaran antara rancangan awal kebijakan anggaran dengan rancangan akhir adalah sebesar Rp. 13,243,592,865.



## **BAB V PENUTUP**

1. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2023 merupakan acuan dan pedoman bagi seluruh ASN yang ada di Dinas Kesehatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Kesehatan sebagai implementasi dari Visi dan Misi Dinas Kesehatan.
2. Dalam rangka mencapai tujuan dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak yaitu "*Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat*", maka pelaksanaan program dan kegiatan mengacu pada nilai-nilai efektif dan efisien, dan serta berpatokan untuk dapat menguntungkan seluruh masyarakat pro rakyat di Kota Pontianak.
3. Dinas Kesehatan Kota Pontianak akan selalu melakukan perbaikan serta monitoring dan evaluasi (monev) terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan khususnya pada capaian kinerja dan anggaran pada akhir tahun.

Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Pontianak,



**dr. Saptiko, M.Med.PH**

NIP. 19661113 199603 1 003



## **DINAS KESEHATAN**

**JL. JEND. AHMAD YANI TELP. (0561) 760528 FAX. 732602 PONTIANAK 78112**  
**WEB : [WWW.DINKESKOTAPONTIANAK.COM](http://WWW.DINKESKOTAPONTIANAK.COM), E-MAIL : DINKESPTK@GMAIL.COM**